

Membangun Kultur Politik dan Politik Kultur

Ditulis oleh Augustinus Simanjuntak
Jumat, 17 April 2009 12:04

Politik adalah suatu kultur. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara interaksi dua arah selalu terjadi dimana kultur bisa terbentuk sebagai hasil konstruksi politik (politik kultur). Sebaliknya kultur dalam masyarakat maupun kultur pemimpin bisa mempengaruhi kultur politik.

Kultur politik diartikan sebagai perilaku dan tata cara pelaksanaan kekuasaan, pengaturan hubungan kekuasaan dengan rakyat, bagaimana mendapatkan legitimasi penguasa, serta bagaimana membuat rakyat taat kepadanya. Sistem kekuasaan feodalistik, misalnya, biasanya lahir sebagai produk kultur masyarakat yang feodal. Demikian pula sistem kekuasaan demokratis lahir dalam kultur masyarakat yang ingin demokratis pula. Misalnya, kekuasaan kesultanan di Yogyakarta dijalankan dengan kultur Jawa yang sangat kental.

Makna politik kultur ialah menjadikan politik sebagai instrumen perubahan sosial atau bahkan rekayasa sosial. Melakukan perubahan sosial biasanya mengacu pada sebuah ideologi negara yang implementasinya banyak dipengaruhi oleh budaya, kepribadian maupun filosofi seorang pemimpin pemerintahan. Sehingga tidak salah kalau ideologi negara, tanpa disadari, bisa mengalami distorsi atau pergeseran dalam implementasinya. Hal ini pernah terjadi di era Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai landasan politik kulturalnya. Dengan dalih stabilitas dan keamanan, aparat negara dibolehkan melakukan tindakan represif terhadap warganya hingga terjadi pelanggaran HAM seperti: penculikan para aktivis, diskriminasi terhadap eks anggota PKI, penerapan DOM di Aceh, Timor-Timur, Irian Jaya, dan sebagainya. Inilah yang disebut: implementasi ideologi dengan melanggar ideologi itu sendiri.

Kekuatan sosial yang terkonstruksi dalam sistem politik merupakan produk dialektis dari beragam kultur atau sistem nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, dinamika nilai-nilai sosial pasti secara bertahap akan menuntut perubahan dalam sistem politik. Mengenai arah perubahan tatanan politik terserah kepada penguasa dan rakyatnya.

Yang jelas kultur sangat berpengaruh terhadap sistem politik, dan sistem politik pun banyak mempengaruhi kultur masyarakat lewat *state polycys*; dan gaya kepemimpinan penguasa.

Sepanjang sejarah manusia beraneka ragam konstruksi kultur yang terbentuk, termasuk kultur politiknya. Dan di balik suatu system kultur atau politik tentu dilatarbelakangi oleh filsafat tertentu yang menjadi dasar bangunannya. Banyak konstruksi kultur yang melahirkan system kekuasaan yang kejam atau menindas, feodalistik, otoriter, diskriminatif atau rasis dan korup. Namun ada pula yang menekankan pada kebebasan (liberalisme) hingga mengabaikan hal-hal yang sifatnya tabu, pola hidup individualistik, dan anti sosial.

Apabila politik berorientasi pada kepentingan materi, kehormatan, dan kekuasaan maka di dalamnya tidak mungkin dicapai suatu keadilan. Yesus mulai

Membangun Kultur Politik dan Politik Kultur

Ditulis oleh Augustinus Simanjuntak
Jumat, 17 April 2009 12:04

dibenci oleh para pemuka agama Yahudi karena kepentingan mereka terancam (materi / kehormatan), sebab pengikut Yesus sudah mulai banyak, yang berarti pula pengikut mereka makin berkurang.

Apalagi waktu Yesus mengaku sebagai Raja orang Yahudi dan Mesias, kebencian itu semakin memuncak. Raja bagi orang-orang Yahudi tentu pemegang kekuasaan, identik dengan pengendali politik kultur, walaupun maksud Yesus ialah Kerajaan Sorga. Kebutaan hati mereka oleh dosa telah membuat mereka salah persepsi tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang ada dalam benak mereka adalah tentang kekuasaan politik.

Politik kultur yang jahat memang sering membawa korban bagi pihak yang tak bersalah. Penyaliban Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus dan tak bercacat, pun tidak lepas faktor kultur politik yang tidak beres. Waktu itu, Pontius Pilatus diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, namun di sisi yang lain dia terdesak oleh tuntutan para pemuka agama Yahudi agar Yesus disalibkan. Dalam konstruksi politik saat itu pengaruh para pemuka agama sangat besar.

Apabila Pilatus tidak mengambil keputusan untuk menyerahkan Yesus untuk disalib maka kekuasaannya bisa terancam. Jadi, selain menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus juga merupakan korban politik penguasa waktu itu.

Yohanes pembaptis harus dipenggal kepalanya hanya karena mengingatkan Herodes mengenai perilaku hidupnya yang mengawini saudara perempuannya sendiri. Ini pun sebuah contoh kritik tajam yang ditujukan kepada pemegang kekuasaan politik yang tidak beres. Pemimpin yang memiliki moral bejat pasti akan menghasilkan politik kultur yang tidak beres sehingga rakyatlah yang menjadi korban. Dalam kondisi seperti itulah dibutuhkan para kritikus yang berani menyuarakan kebenaran.

Dengan demikian posisi umat Kristiani dalam kultur politik sangat penting. Hal ini tidak lepas dari mandat yang telah diberikan kepadanya untuk menjadi *garam* dan *terang* dalam segala konstruksi kultur. Banyak kultur masyarakat yang masih tertinggal atau justru menghambat kemajuan warganya.

Kultur demikian tentu membutuhkan perubahan secara mendasar baik dari dalam sendiri maupun melalui interaksi sosial. *Garam* itu harus merembes masuk dalam kultur masyarakat untuk memberi rasa, termasuk dalam kultur politik, sehingga bisa terbentuk suatu politik kultur yang benar-benar memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 'Garam' itu tidak perlu kelihatan. Tidak perlu menonjolkan simbol-simbol atau jargon-jargon golongan dalam berpolitik.

Politik kekerasan atau kekerasan politik tak akan bisa dicegah apabila tidak ada *terang* yang

Membangun Kultur Politik dan Politik Kultur

Ditulis oleh Augustinus Simanjuntak
Jumat, 17 April 2009 12:04

bersinar di dalamnya. Politik kotor atau curang tidak akan bisa bersih bila tidak ada orang yang memberi *cahaya* di dalamnya.

Sebagai suatu kesimpulan. Tingkat kemajuan politik negara kita tergantung sejauh mana kultur masyarakat kita berkembang. Peranan umat Kristiani dalam dunia politik bisa secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung berarti lewat pembangunan kultur masyarakat, sedangkan secara langsung terlibat dalam politik kultur (membangun kekuasaan yang adil) dan kritik yang mengoreksi jalannya pemerintahan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin.

Augustinus Simanjuntak, SH.,MH

12 April 2004